



# Dewan Desak Pemkab Evaluasi Setor Modal ke BPD

Singaraja (Bali Post) -

Dewan di Buleleng meminta pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan menyetorkan dana penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Bahkan, dewan di daerah ini mengisyaratkan agar kebijakan menyertakan modal itu dihentikan sementara waktu. Kemudian dana penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBD Induk 2016 diarahkan untuk menunjang perusahaan daerah (PD) di Bali Utara.

Wacana itu mencuat pada saat DPRD Buleleng membahas Rancangan APBD Buleleng tahun 2016, dan penetapan APBD Buleleng tahun 2016. Ketua Komisi I Putu Mangku Mertayasa akhir pekan lalu mengatakan, selama ini pemerintah daerah tidak pernah absen menyetorkan dana penyertaan modal ke BPD Bali. Penyertaan modal ini akan berdampak tidak baik terhadap perusahaan daerah milik pemerintah. Pada situasi ini, pihaknya pesimis kalau perusahaan daerah dapat bersaing dengan perusahaan lain. Agar perusahaan milik pemerintah bisa berdaya saing, maka bisa saja penyertaan modal yang semua rutin disetor ke BPD dialihkan untuk perusahaan daerah.

Senada diungkapkan anggota dewan lainnya, Ni Kadek Turkini. Politisi asal Lovina ini meminta

pemerintah mengalihkan anggaran penyertaan modal ke BPD itu ke perusahaan daerah. Hal ini jauh lebih memberikan manfaat, karena selama ini beberapa perusahaan daerah milik Pemkab masih mengalami hambatan dari segi permodalan.

Menanggapi tawaran dewan tersebut, Sekkab Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka, M.P. mengatakan, pemerintah tidak bisa mengambil kebijakan untuk menghentikan menyertakan modal ke BPD. Alasannya, karena sudah menjadi hasil kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS - red) kalau masing-masing kabupaten termasuk Buleleng wajib menyetorkan dana penyertaan modal ke BPD setiap tahun. Kesepakatan penyertaan modal secara berkala dalam jangka panjang, sehingga tidak mungkin dihentikan begitu

saja.

Terkait perhatian permodalan untuk perusahaan daerah, dibutuhkan dalam waktu mendesak dan itu masuk program skala prioritas, maka pemerintah bisa saja akan mengusulkan tambahan modal itu melalui APBD. Puspaka menambahkan, alokasi anggaran untuk penyertaan modal Pemkab ke BPD itu tergolong kecil. Hal ini karena dukungan anggaran yang ada belum mencukupi, karena harus terbagi untuk pembangunan infrastruktur fisik dan program lain. Dia mencontohkan, tahun 2016, penyertaan modal kepada BPD Bali dirancang sebesar Rp 7 miliar. Sedangkan pada APBD tahun 2015, penyertaan modal mencapai Rp 10 miliar. Itu artinya, anggaran penyertaan modal ini sudah dikurangi karena kondisi anggaran yang tidak mendukung. (kmb38)

Edisi : Senin, 16 November 2015

Hal : 7





**Kasus PDAM Karangasem** ✓

## *Penyidik Kembali Terbitkan Sprinlid*

Denpasar (Bali Post) -

Petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali awal tahun lalu hingga pertengahan tahun ini memang begitu gencar melayangkan surat panggilan untuk penanganan dugaan kasus penyimpangan. Salah satunya adalah kasus PDAM Karangasem. Yang menarik dalam kasus ini, penyidik kejaksaan "melangkah mundur" karena kembali menerbitkan sprinlid (surat perintah penyelidikan). Mengapa?

Salah satu penyidik senior Pidsus Kejati Bali Dr. Akmal Kodrat bersama Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan mengatakan, awalnya perkara ini adalah soal pemesanan PDAM baru, yakni soal amprahan pipa ke rumah-rumah. Namun dalam perkembangan dan pemeriksaan saksi, justru pengadaan tanahnya yang menjadi persoalan karena ada dugaan penyimpangan. "Sehingga, untuk amprahan pipanya ke rumah tangga kami hentikan. Sedangkan untuk menghindari persoalan baru, kami keluarkan sprinlid baru" jelasnya.

Ditambahkannya, pemeriksaan saksi-saksi sama dengan saksi sebelumnya. Dalam panggilan suratnya sekarang, untuk kasus pengadaan tanahnya. "Jangan sampai kita diprotes, sprinlid kasus pipa tapi kasusnya pengadaan tanah. Ini kita hindari. Calon tersangkanya masih tetap kok, masih sama seperti yang dulu," sebut Dr. Akmal Kodrat.

Selain kasus PDAM Karangasem, ada juga kasus bagian PHR (Pajak Hotel dan Restoran) untuk enam kabupaten di Bali. Sejumlah pejabat dan pejabat setingkat bupati serta mantan pejabat, sudah dilakukan pemeriksaan di Kejati Bali. Namun, hingga saat ini kasus tersebut masih melempem dan gamang karena belum ada kemajuan.

Salah satu tim penyidik Made Tangkas yang dimintai konfirmasi terkait perkembangan penyelidikan belum lama ini hanya mengatakan "belum". Belum, maksud jaksa senior di Kejati Bali itu karena belum melakukan ekspos kecil terkait hasil pemeriksaan sejumlah pejabat yang dilakukannya. (kmb37)

Edisi : Senin, 16 November 2015

Hal : 2





Bali Post



Rekomendasi Dewan

Tindak Tegas

Pelanggar Tata Ruang

Gianyar (Bali Post) -

DPRD Gianyar akhirnya mengeluarkan rekomendasi terkait maraknya pelanggaran tata ruang yang terjadi di Kabupaten Gianyar. Dalam rekomendasi tersebut, dewan meminta eksekutif segera mengambil tindakan tegas berupa penutupan hingga pembongkaran terhadap tempat usaha yang melanggar ketentuan tata ruang, sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Gianyar.

Ketua DPRD Gianyar Wayan Tagel Winarta, didampingi Ketua Komisi I Nyoman Artawa Putra, Minggu (15/11) kemarin, mengungkapkan rekomendasi tersebut merupakan hasil rapat pimpinan dewan yang digelar, Jumat (13/11) lalu. Pada rapat tersebut, seluruh unsur pimpinan termasuk pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan sepakat untuk mengeluarkan rekomendasi guna menyikapi maraknya pelanggaran tata ruang.

"Dewan merekomendasikan eksekutif selaku penegak

perda untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terapkan perda dengan sebaik-baiknya. Bagi para pelanggar, eksekutif harus mengeluarkan surat peringatan sesuai tahapan. Mulai surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Dan apabila ketiga kalinya surat peringatan tidak diindahkan, bisa dilakukan penutupan sementara sampai pembongkaran tempat usaha. Kalau ijinnya sudah keluar, izin bisa dicabut dan dibatalkan," kata Tagel.

Dalam rekomendasi terse-

but, dewan memberikan catatan khusus di mana perda tidak berlaku surut. Tagel menjelaskan, itu berarti eksekutif harus segera menindak tegas pelanggaran yang terjadi setelah perda ditetapkan. Sedangkan tempat usaha yang sudah berdiri sebelum Perda RTRW Gianyar ditetapkan, masih bisa dikoordinasikan mengenai tindakan yang akan diambil selanjutnya.

Lebih lanjut dikatakannya, pelanggaran tata ruang di Kabupaten Gianyar sudah sangat marak. Hal ini harus segera direspons oleh pemerintah. Jangan sampai pelanggaran dibiarkan dan terus menjadi contoh buruk pembangunan ke depan. Dari catatan dewan selama melakukan sidak, sudah terdapat puluhan pelanggaran yang terjadi. Dewan menemukan pelanggaran jalur hijau terjadi di 3 lokasi, yakni di Kemenuh, Bedulu dan kawasan Goa Gajah. Terdapat 5 hotel

Edisi : Senin, 16 November 2015

Hal : 9





Sambungan - - -

atau vila yang diduga menyero-  
bot sempadan pantai, seperti di  
Pantai Keramas dan Ketewel.  
Dewan menemukan 10 ho-  
tel atau vila yang melanggar  
kawasan kesucian pura yang  
tersebar di kawasan Ubud,  
Tegallalang dan Blahbatuh.

"Dan untuk pelanggaran  
sempadan sungai, kalau  
dihitung dari dulu sampai  
sekarang sudah luar biasa  
banyaknya. Jumlahnya bisa  
lebih dari puluhan pelang-  
garan. Itu terjadi di kawasan  
Ubud dan Tampaksiring,"  
kata Tagel.

Artawa Putra menam-  
bahkan, maraknya pelang-  
garan tata ruang tersebut  
sebenarnya telah mencoreng  
wibawa pemerintah dalam  
penegakan aturan. Untuk itu,  
pemerintah sebaiknya segera  
mengambil tindakan tegas.  
Di sisi lain, pelanggaran tata  
ruang juga sangat merugikan  
masyarakat. Alih fungsi lahan  
makin tak terkendali. Bahkan

kawasan hutan di Gianyar  
juga diserobot dialih fungsi-  
kan untuk pembangunan.

Maraknya pelanggaran  
tak terlepas dari lemahnya  
pengawasan pemerintah. Di  
sisi lain, koordinasi antara  
eksekutif dengan legislatif  
terkait pembangunan di Gi-  
anyar juga belum efektif.  
Dewan, kata dia, tidak pernah  
diajak berkoordinasi untuk  
mempertimbangan dampak  
investasi yang masuk. "De-  
wan baru tahu kalau sudah  
ada polemik di masyarakat.  
Yang jelas sekarang pemerin-  
tah harus menindak tegas pe-  
langgaran. Tidak hanya bagi  
usaha bodong, usaha atau  
proyek yang sudah mengan-  
tongi izin juga harus diawasi.  
Kalau dalam kenyataannya  
ada ketidaksesuaian antara  
realitas di lapangan dan izin-  
nya, maka itu kita rekomen-  
dasikan juga untuk ditutup.  
Izinnya harus dikaji kembali,"  
tegasnya. (kmb25)





## Sempat Ngadat, Jatah BKK Cair ✓ Desa Pakraman Rp 200 Juta, Subak Rp 50 Juta

**Singaraja (Bali Post) –**

Setelah menimbulkan polemik terkait pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa pakraman dan subak di Buleleng, sejak 4 November 2015 lalu dana tersebut sudah direalisasikan. Dana ini telah dibayarkan sesuai surat Badan Pembudayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Buleleng, tanggal 19 November 2015 memerintahkan perbekel untuk mentransfer dana BKK Provinsi Bali itu kepada desa pakraman dan subak di Buleleng.

Ketua Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Buleleng Dewa Patu Budarsa akhir pekan lalu mengatakan, surat BPM-PD itu menindaklanjuti Surat Gubernur melalui Setda Bali tanggal 13 Oktober 2015, dan hasil koordinasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Buleleng maka perbekel diperintahkan agar mentransfer dana BKK ke rekening desa pakraman, subak dan subak abian di wilayahnya. Budarsa mengaku lega dengan terbitnya surat ini. Sebab, pencairan tersebut sempat mandek. Setelah cair, dia meminta kepada klian desa pakraman memanfaatkan dana tersebut sesuai peruntukannya. "Kami senang sekali dana itu sudah dicairkan. Kawan-kawan klian desa pakraman dapat memanfaatkan dana itu sesuai program yang sudah ada," katanya.

Kepala BPM-PD I Gede Sandhiyasa mengatakan, pencairan dengan pola ini sifatnya sementara. Hal itu mengantisipasi jangan sampai dana BKK pencairannya tertunda. Kadang ada kendala teknis menyangkut jenis

rekening BKK Provinsi Bali dalam bentuk rekening giro. Biasanya, rekening jenis ini untuk membiayai program atau kegiatan yang diajukan kepada pemerintah daerah. Dana yang masuk rekening giro tidak dapat ditransfer ke rekening tabungan yang dimiliki desa pakraman maupun subak.

"Sementara dipakai kedua (ermendagri, karena rekening BKK dalam bentuk giro tidak bisa ditransfer ke rekening tabungan. Nanti tahun depan akan ada perubahan tergantung petunjuk pelaksanaan dari pemprov," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, jatah dana BKK ini tidak bisa dicairkan karena belum adanya petunjuk jelas tentang mekanisme pencairan jatah dana tersebut. Hal ini karena adanya dua regulasi yang menjadi dasar pencairan jatah dana BKK. Regulasi itu Permendagri No. 113 Tahun 2015 dan Permendagri No. 37 Tahun 2007. Situasi ini menimbulkan keraguan para perbekel dan klian pakraman. Atas hal itu, Bupati Agus Suradnyana sempat mengumpulkan pihak terkait, untuk membahas persoalan itu. Bupati kemudian sepakat meminta penjelasan Provinsi Bali atas regulasi tersebut. Dari hasil koordinasi itu, pemprov memerintahkan perbekel mentransfer dana tersebut ke masing-masing desa pakraman dan subak. Di Buleleng terdapat 169 desa pakraman. Masing-masing menerima dana BKK sebesar Rp 200 juta setiap tahun. Sementara subak dan subak abian masing-masing dijatah dana sebesar Rp 50 juta setiap tahun. (kmb38)





## Target Enam Kasus Belum Terealisasi

# Penanganan Kasus Korupsi Terhambat OJK dan BPKP

Denpasar (Bali Post) -

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali hingga saat ini belum memiliki pimpinan. Pascaditinggal Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Momock Bambang Sumiarso, untuk sementara Kajati dijabat Wakajati Bali. Sedangkan sejumlah kasus menjadi atensi publik, khususnya soal perkara korupsi. Pihak Pidsus Kejati Bali belum mampu melimpahkan enam perkara sebagaimana diangan-angankan beberapa waktu lalu. Belum terealisasinya pelimpahan enam perkara yang sudah masuk tahap penyidikan itu, lantaran terbentur OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Hal itu dibenarkan salah satu penyidik senior Pidsus Kejati Bali Dr. Akmal Kodrat bersama Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan, Minggu (15/11) kemarin. "Kalau kasus Undiksha dan IHDN kan sudah kami limpahkan. Sedangkan kasus korupsi di BPD Bali, kami masih menunggu OJK," katanya.

Dikatakannya, pihak penyidik sudah meminta ke OJK soal

BPD Bali ini. Bahkan sampai berkas-berkasnya sudah dibawa ke sana. Namun, hingga saat ini belum ada hasil telaah dari OJK. "Sudah cukup lama kami minta ke OJK, sudah tiga bulan, tetapi belum ada jawaban hingga saat ini," sebutnya.

Sementara untuk perkara dugaan korupsi di Stitna/Stikes Jembrana yang menetapkan tiga tersangka termasuk mantan Bupati Prof. I Gede Winasa dan

mantan Kadisdik Jembrana, penyidik Pidsus Kejati Bali juga belum bisa melimpahkan berkas perkaraanya ke Pengadilan Tipikor Denpasar. "Pada pokoknya, baik kasus BPD maupun Stitna/Stikes ini kami sudah siap. Berkas sudah rampung. Memang, untuk kasus Stitna dan Stikes ini awalnya ada temuan BPKP ada penyimpanan hingga Rp 1,6 miliar. Dari temuan itulah kami melakukan penyelidikan hingga tahap dik (penyidikan). Namun untuk memastikan kerugian negara secara faktual, saat ini kami tunggu audit BPKP secara resmi," ungkapnya.

Saat disinggung mengapa begitu lama menunggu OJK maupun BPKP, Ashari Kurniawan mengatakan, soal audit itu memang diharuskan dalam perkara korupsi. "Jika ditanya mengapa lama, coba tanyakan saja ke OJK dan BPKP," saran Ashari

Kurniawan.

Selain dua perkara tersebut, perkara lainnya juga sedang menunggu pelimpahan. Perkara yang belakangan menyeret nama BPN Gianyar itu adalah kasus dugaan korupsi pembebasan lahan untuk Jalan By-pass Prof. Ida Bagus Mantra. Tersangkanya adalah Bawa, I Gede Wayan Bisma, I Wayan Sudiasa dan I Made Surna. Sedangkan untuk kasus Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, dari lima yang sudah dilakukan penahanan, dua orang sudah dilakukan pelimpahan tahap II, dan tiga orang lainnya segera menyusul. Bahkan untuk kasus *dana punia* di lingkungan Institut Hindu Dharna Negeri (IHDN) Denpasar dengan tersangka Prof. Made Titib dan Dr. Praptini, sudah dilakukan tahap II pekan lalu.

Dengan demikian, dari enam perkara yang ditarget masuk

tipikor tahun ini, masih tiga perkara yang mengalami hambatan. Yakni kasus BPD Bali Cabang Tabanan dengan tersangka Wayan Sukaja (sekarang mantan karyawan bagian kredit di Bank BPD Cabang Tabanan), kasus Stitna/Stikes dengan tersangka Prof. Winasa dan mantan Kadisdik serta kasus pembebasan lahan Jalan Prof. Mantra. Yang sudah dilakukan pelimpahan adalah *mark-up* pengadaan lahan di Undiksha, 16 item proyek IHDN Denpasar dengan terdakwa I Putu Sukarsana sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kasus *dana punia* IHDN Denpasar dengan tersangka Prof. Made Titib dan Dr. Praptini. (kmb37)





## Terpengaruh BPHTB, Target PAD Turun ✓

Denpasar (Bali Post) -

Pemkot melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Denpasar merancang target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Denpasar di APBD Induk 2016 Rp 715,32 miliar lebih. Nilai ini menurun dibandingkan target PAD di APBD Perubahan 2015 yang mencapai Rp 719 miliar. Penurunan tersebut dipengaruhi menurunnya pendapatan dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kepala Dispenda Kota Denpasar I Dewa Nyoman Semadi membenarkan kondisi tersebut. Bahkan, pihaknya mengaku sudah mengajukan surat ke pimpinan (wali kota) tentang BPHTB tersebut guna ditinjau kembali. "BPHTB berkurang karena pajak untuk waris dinolkan. Tetapi, transaksi jual beli kan masih ada. Sehingga penurunannya kita asumsikan tidak terlalu signifikan, namun tetap memberi dampak pula. Sehingga jika dari induk 2015 memang target PAD meningkat, tetapi jika dibandingkan dengan perubahan targetnya menurun sedikit," jelas mantan Asisten III ini saat dimintai konfirmasi, baru-baru ini.

Pihaknya memaparkan, dari delapan pajak yang dipungut, BPHTB memberikan kontribusi paling besar. Karenanya, jika ada perubahan atau penurunan maka akan berlaku sama pada PAD. "Di induk 2015 kami rancang Rp 155 miliar, tetapi tercapai. Di perubahan kami turunkan menjadi Rp 145 miliar. Ini pun kami masih pesimis bisa terpenuhi," katanya.

Dewa Semadi mengaku ada kendala dalam transaksi jual beli di Denpasar. "Penurunan BPHTB dipicu situasi ekonomi. Akhir-akhir ini transaksi di Denpasar lesu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar I.B. Kompyang Wiranata mengatakan, untuk menopang target PAD, pendapatan yang bersumber dari pajak hotel masih menjadi andalan. Tahun 2016 mendatang, kontribusi pajak hotel ditargetkan Rp 122 miliar lebih. Sedangkan kontribusi pajak restoran, Rp 70 miliar lebih. (kmb12)

Edisi : Senin, 16 November 2015

Hal : 2